

Menghentikan Siklus Korupsi Lokal

Israr Iskandar,
Pengajar Universitas Andalas dan
Fellow di CIRUS Jakarta

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, tren korupsi di daerah akhir-akhir ini kian meningkat. Lembaga advokasi dan penelitian antikorupsi ini menyatakan, jumlah kasus yang terungkap dan nilai kerugian negara pada semester I-2010 di pelbagai daerah meningkat dua kali lipat ketimbang periode sama tahun 2009 lalu.

Kalau disimak, laporan ICW itu sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Satu dekade pelaksanaan otonomi daerah justru telah menjadi "desentralisasi" korupsi. Tak ada upaya maksimal mengantisipasi berbagai distorsi di balik euforia pelimpahan kekuasaan ke daerah. Akibatnya, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pokok otonomi daerah tidak kunjung terwujud.

Ditinjau dari segi basisnya, korupsi di daerah terjadi merata di seluruh instansi publik maupun non-publik, mulai dari eksekutif (birokrasi), legislatif, yudikatif, hingga dunia usaha. Tak hanya itu, korupsi berkembang karena mandulnya fungsi-fungsi pengawasan yang semestinya dimainkan oleh masyarakat sipil dan media massa lokal.

Gurita korupsi di jajaran pemerintahan lokal mungkin tak perlu diherankan, karena memang hingga kini reformasi birokrasi tak pernah jalan di banyak daerah. Walaupun beberapa personel pemerintahan daerah merupakan hasil rekrutmen baru, tapi sebagian besar pimpinan birokrasi lokal adalah produk sistem birokrasi patrimonial dan korup warisan rezim Orde Baru.

Jangan heran, praktik pemerintahan lokal membuka celah dan peluang untuk beragam bentuk penyimpangan dan korupsi. Contoh, sistem yang memungkinkan pejabat lokal menerima honor-honor kegiatan dan program yang jumlahnya justru lebih besar dari gaji pokok mereka.

Celaknya, kepala daerah hasil pilkada langsung ternyata gagal menjadi aktor pembaruan lokal. Mereka malah jadi motor korupsi di daerah. Kampanye pilkada berbiaya mahal membuat banyak kepala daerah terpilih hanya berpikir mengembalikan ongkos besar yang telah dihabiskannya, atau mengumpulkan dana untuk mengincar masa jabatan kedua atau posisi politik lebih tinggi.

Berharap pada legislatif lokal juga setali tiga uang, karena anggota parlemen di daerah lahir dari proses dan sistem kepartaian dan pemilu yang masih korup. Bagi banyak politikus, ikut serta dalam

pemilu belum menjadi pintu masuk untuk mengabdikan kepada rakyat, tapi justru menjadikannya sebagai arena memperjuangkan tujuan ekonomi politik.

Masih parsial

Jangan heran, pasca-terpilih, banyak anggota DPRD menyisihkan kepentingan publik. Mereka sibuk mengembalikan atau bahkan melipatgandakan investasi politik yang telah dikeluarkan se-

Gurita korupsi di jajaran pemerintah daerah mungkin tak perlu diherankan.

lama pemilu. Tiga fungsi utama legislatif, akhirnya menjadi terabaikan, baik legislasi, anggaran, apalagi pengawasan. Mereka bahkan cenderung "berkolusi" dengan eksekutif dalam pola "politik kartel". Kondisi inilah yang menyebabkan siklus korupsi lokal sulit dihentikan, sukar dibendung.

Kondisi kian parah karena lembaga yudikatif yang bertanggung jawab menegakkan hukum juga bermasalah. Kejaksaan, pengadilan maupun kepolisian di banyak daerah masih jauh dari semangat

reformasi. Kenyataan ini bisa "dimengerti" karena pada level nasional upaya reformasi lembaga penegak hukum masih jalan di tempat, bahkan mengalami *set back*, sebagaimana tercermin dari terbongkarnya banyak skandal korupsi yang melibatkan aparat.

Tentu amat sulit mengharapkan perubahan di daerah jika pilar-pilar antikorupsi ini justru masih bergelimpang korupsi. Kalau pun ada upaya-upaya perubahan, tentu masih parsial. Di era reformasi, memang ada sejumlah kepala daerah yang dianggap sukses melakukan inovasi perubahan di lingkungan birokrasi, tapi kelanjutannya justru sering terancam, bahkan titik balik, seperti di Solok dan Tanah Datar, Sumatera Barat.

Kendalanya, karena inisiatif progresif itu sering "berhadapan" dengan instansi vertikal yang masih korup, seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian. Selain itu, sistem pemilu dan pilkada sekarang tetap potensial melahirkan "pemimpin bandit" yang menjadi batu sandungan bagi kelanjutan program reformasi lokal.

Sekalipun demikian, program pemberantasan korupsi di negeri ini hanya berhasil jika dilakukan dalam sistem pembaruan yang terpadu. Pembaruan lokal bisa berjalan kalau ada upaya simultan dengan pembaruan atas pilar-pilar demokrasi lainnya. ■